

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berupaya memberikan konteks teoritis dan menempatkan studi empiris dalam fokus akademis terkini, sehingga kontribusi teoritis dan praktis yang diberikan tampak lebih jelas. Cakupan penelitian terbatas pada aspek-aspek sempit dari komunikasi pembangunan dan *community engagement* karena keduanya dianggap paling relevan. Penelitian ini juga terutama mengacu pada elemen-elemen teoritis komunikasi pembangunan.

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai komunikasi pembangunan secara normatif berkaitan dengan jenis pendekatan komunikasi apa yang diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Servaes & Lie, 2020). Pemilihan dan penerapan pendekatan komunikasi ini biasanya dipengaruhi oleh tiga faktor (Morris, 2006; Mefalopulos, 2008; Servaes & Malikhao, 2020). Pertama, bergantung pada tujuan dari intervensi, apakah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan atau untuk memberdayakan penerima manfaat pembangunan. Kedua, dibentuk oleh perspektif komunikasi yang berbeda, yaitu model komunikasi linier, seperti difusi inovasi, atau model komunikasi partisipatif untuk memfasilitasi pemahaman bersama dan membangun kepercayaan. Ketiga, tergantung pada cara menilai dampak komunikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Konsep-konsep dalam praktik komunikasi pembangunan dipengaruhi oleh cara pembangunan didefinisikan, baik itu berdasarkan paradigma modernisasi atau pembangunan sebagai perubahan kondisi manusia (Servaes & Lie, 20220; Servaes & Malikhao, 2020). Komunikasi pembangunan dan perubahan mempunyai peran penting yaitu untuk melihat bagaimana keahlian komunikasi masyarakat lokal bisa

diterapkan dalam menghadapi masalah – masalah setempat (McAnany, 2021). Kekuatan lokal dari komunikasi untuk mendukung perubahan saat ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dasar komunikasi manusia yang sudah ada sejak lama. Hal ini dilakukan dengan melihat kehidupan masyarakat setempat untuk membawa perubahan sejak bahasa lokalnya muncul bertahun – tahun lalu.

Penggunaan bahasa lokal dan penggabungan nilai-nilai lokal dalam melibatkan masyarakat dapat mendukung upaya pemberdayaan (Parahita, 2018). Pemberdayaan tidak hanya pada tingkat pribadi, di mana individu memperoleh kepercayaan diri dan meningkatkan harga diri untuk membuat keputusan dan menjadi peserta aktif dalam kegiatan proyek; tetapi juga pada tingkat komunitas, di mana masyarakat menjadi berdaya dengan akses terhadap informasi dan berpartisipasi sebagai pengambil keputusan (Yudarwati & Gregory, 2022). Oleh karena itu, memahami faktor sosial dan budaya sangat penting ketika mempertimbangkan konteks pemberdayaan. Peneliti mengkaji kosnsep yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu *community engagement* dan kaitannya dengan partisipasi dan pemberdayaan dalam komunikasi pembangunan.

a. *Community Engagement* dan Kepemilikan Program pembangunan

Praktik *community engagement* memberikan rasa kepemilikan, namun tidak selalu menjamin terpenuhinya kebutuhan semua anggota komunitas atau partisipasi aktif mereka. Penelitian sebelumnya *Community Engagement in a Festival in Indonesia* (Sakitri, 2018), mengkaji *community engagement* dalam festival di Indonesia, menemukan bahwa pedagang aktif berpartisipasi sebagai peserta tetapi tidak merasa memiliki atau percaya diri untuk berperan sebagai panitia atau inisiator. Sementara itu, penelitian Talò (2024) menekankan bahwa

partisipasi meningkatkan kapasitas individu dan kelompok serta membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Penelitian milik Sakitri (2018) dan Talò (2024) belum mengulasi kecenderungan perilaku *community engagement* untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menganalisis *community engagement* dalam program pembangunan pariwisata berbasis budaya, dengan fokus pada program pembangunan pariwisata tradisi tinju adat etu di Kabupaten Nagekeo. Penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi aktif, rasa kepemilikan, dan kepercayaan dalam komunikasi pembangunan. Selain itu, penelitian ini membedakan konsep *engagement* dan mengkaji interaksi komunitas dengan masyarakat dan pemerintah. Hasilnya juga mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci dalam komunikasi pembangunan.

b. *Community Engagement* untuk Membangun Kepercayaan dan Keberhasilan Program Pembangunan

Community engagement berkaitan dengan komunikasi dan kepercayaan untuk membangun partisipasi. Perubahan sikap dan perilaku dapat terjadi secara sukarela melalui komunikasi persuasif dan pesan yang efektif, sehingga bentuk keterlibatan satu arah cocok untuk publik yang pasif dan tidak memiliki kekuatan setara (Mefalopulos, 2018; Dhanesh, 2017). Yudarwati (2019) menekankan bahwa dalam keterlibatan satu arah, interaksi hanya terjadi sesekali dan keputusan tetap dikendalikan oleh komunitas.

Yudarwati (2019) dalam artikelnya *Appreciative Inquiry for Community Engagement in Indonesia Rural Communities*, menekankan pentingnya membangun kepercayaan *dalam community engagement* menggunakan bahasa

‘ibu’ komunitas untuk memulai percakapan dan meminta mereka untuk menceritakan kisah tentang pekerjaan mereka untuk memulai percakapan. Namun, meskipun keterlibatan aktif terjadi, rasa percaya diri dan kepemilikan belum sepenuhnya terbentuk. Hal ini juga ditunjukkan dalam penelitian Bait et al., (2019) *Community Engagement To Manage Acute Malnutrition: Implementation Research In Kupang District, Indonesia*, cara terbaik yang dilakukan untuk mengatasi malnutrisi di Kota Kupang adalah dengan memperkuat strategi mobilisasi komunitas dari tingkat desa hingga tingkat yang lebih luas. Pendekatan tersebut berhasil menarik perhatian para pengambil keputusan dan mendapatkan dukungan tambahan, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia maupun dana.

Kegagalan pemerintah dalam memahami pembangunan dalam komunitas adat sering kali disebabkan oleh pengabaian komunikasi tradisional, yang berujung pada kesalahpahaman terhadap nilai – nilai adat (Parahita, 2018). Bait et al., (2019) menjelaskan bahwa pelaksanaan program berbasis komunitas harus menyadari bahwa tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua kondisi. Dengan demikian, dalam *community engagement* perlu mempertimbangkan strategi dan proses yang tepat, disesuaikan dengan nilai – nilai lokal yang dianut. Di sisi lain, sikap masyarakat yang cenderung bergantung pada pendekatan *top-down* bahwa pengetahuan pemerintah dan lembaga-lembaga itu selalu benar, sementara penduduk lokal dianggap tidak tahu atau salah dalam keyakinan mereka (Waisbord, 2020).

Berdasarkan permasalahan partisipasi dan pemberdayaan, masyarakat merasa inovasi itu bukan milik mereka, tapi milik pemerintah. Akibatnya, mereka mengharapkan pemerintah untuk memperbaiki jika ada masalah. Rasa tidak berdaya muncul karena masyarakat yang dituju tidak memiliki pilihan untuk menolak saran atau mengubah intervensi yang diberikan. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki sikap untuk saling menerima, terutama dalam program pembangunan. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan *community engagement* yang berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai – nilai lokal, komunikasi yang efektif, dan cara membangun kepercayaan yang tepat.

c. Kesetaraan Infrastruktur Komunikasi dan Informasi dalam *Community Engagement*

Kejelasan komunikasi dan informasi menjadi bagian penting dalam pembangunan karena berperan memberikan arahan dan masukan yang diperlukan, salah satunya untuk pengambilan keputusan dalam masyarakat (Mefalopulos, 2008). Penelitian milik Setiawan et al., (2020) menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan partisipasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pengambilan waktu yang tidak tepat, jadwal yang tidak beraturan dan kurangnya informasi dari pihak yang berada di tingkatan atas, yaitu pemerintah. Selain itu, sangat penting untuk menekankan kesetaraan dalam *community engagement*, karena saat ini banyak upaya *community engagement* cenderung bekerja dengan orang yang mungkin

berpartisipasi karena memiliki keuntungan, sumber daya dan kelompok pendukung, sehingga menciptakan ketimpangan (Hawkins, 2023).

Komunikasi untuk inisiatif *community engagement* juga harus difokuskan pada cara menciptakan akses terhadap sumber daya dan layanan, misalnya dalam pengembangan bersama infrastruktur lokal serta penciptaan solusi komunikatif dan kultural (Dutta, 2021). Hal ini ditunjukkan pada penelitian komunikasi *Communiting, Communication, and Community Engagement From a Communication Infrastructure Theory Perspective* (Jung & Kim, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa kepemilikan dan partisipasi, di mana masyarakat dengan akses infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi memiliki rasa kepemilikan dan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki akses. Temuan ini mengindikasikan bahwa teknologi komunikasi dapat membantu mempertahankan hubungan dalam komunitas. Dalam konteks komunikasi pembangunan, *community engagement* yang efektif memerlukan integrasi antara akses teknologi, kesetaraan, kejelasan komunikasi dan peningkatan pelaksanaan untuk menciptakan partisipasi yang lebih inklusif.

d. *Community Engagement* dan Peran Pemangku Kepentingan

Konsep *community engagement* terus berkembang hingga saat ini melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan. Fokus *community engagement* berkembang juga pada pengaruh dan cara *community engagement* dapat melibatkan pemangku kepentingan untuk mendukung keberhasilan program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah. Hal ini menyoroti pentingnya

komitmen dari komunitas dan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian inti dari proses pembangunan.

Community Engagement In Development Projects: Government Versus Private Funded Projects In Ghana oleh Arkorful et al., (2023) mengidentifikasi pemangku kepentingan dalam program pembangunan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program yang didanai oleh pemerintah cenderung rendah, sementara *community engagement* dalam program yang didanai oleh organisasi swasta lebih tinggi. Hal ini memengaruhi pengetahuan dan rasa kepemilikan bersama. Pemangku kepentingan lokal seperti pemimpin adat dan tokoh masyarakat harus diberdayakan untuk memimpin perubahan budaya dan pandangan. Namun, hal ini juga mengalami tantangan yaitu terbatasnya sumber daya, adanya kepentingan yang berbeda – beda dari setiap pihak, kurangnya distribusi informasi, sikap masyarakat terhadap perubahan, serta campur tangan dari pemerintah pusat atau politik.

Hal lain juga ditemukan dalam penelitian sebelumnya *Community engagement, commitment and sustainability of public-private partnership projects* (Mwesigwa et al., 2024), bahwa melibatkan komunitas sangat membantu dalam menangani kekhawatiran mereka terhadap proyek pembangunan, meningkatkan responsivitas, transparansi dan akuntabilitas. Ketika komunitas dilibatkan dalam aktivitas proyek, pertukaran informasi dan interaksi meningkat, yang pada akhirnya memperkuat dedikasi para pemangku kepentingan terhadap proyek.

Jika dihubungkan dengan permasalahan pelibatan masyarakat oleh pemerintah, harus diakui bahwa melibatkan masyarakat pada berbagai tahap

proyek atau program pembangunan dapat membantu membentuk kepercayaan, rasa memiliki, serta menghasilkan ide – ide yang baik. Hal ini juga menjadi penting agar partisipasi pasif dari masyarakat tidak selalu dianggap sebagai kegagalan dalam program pembangunan. Keterbatasan pada penelitian Mwesigwa et al., (2024) terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jenis kualitatif. Temuan penelitian tersebut dapat digunakan untuk mendukung argumen peneliti, dalam menjelaskan temuan dan hasil pada penelitian ini.

Penelitian ini mengisi keterbatasan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor – faktor yang dapat mempertahankan sebuah program pembangunan. Fokus pada kajian komunikasi pembangunan memungkinkan eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana membangun rasa memiliki, kepercayaan dan komitmen masyarakat, serta peran pemangku kepentingan dalam mendukung keberhasilan program pembangunan.

Penelitian – penelitian *community engagement* sebelumnya belum membahas secara spesifik proses *community engagement* untuk menggerakkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan, khususnya pembangunan pariwisata berbasis nilai lokal. Pertama, penelitian terdahulu lebih fokus pada pengaruh *community engagement* terhadap komitmen anggota komunitas dan pemangku kepentingan dalam program pemerintah, sementara penelitian ini menyoroti partisipasi masyarakat dalam program yang dikelola oleh komunitas dan didukung pemerintah. Kedua, terdapat perbedaan dalam pendekatan penelitian, di mana sebelumnya lebih dominan menggunakan metode kuantitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode

kualitatif yang lebih mendalam. Ketiga, meskipun *community engagement* sering dikaitkan dengan partisipasi, peran komunitas dalam menggerakkan partisipasi masyarakat lokal belum dijelaskan secara rinci. Berbeda dari kajian sebelumnya yang lebih menekankan pada keterlibatan individu, penelitian ini menekankan *community engagement* untuk menggerakkan partisipasi masyarakat pada program pembangunan pariwisata berbasis tradisi adat dan model pendekatan komunikasi yang muncul dengan mempertimbangkan nilai – nilai lokal dan peran masyarakat sebagai inisiator, bukan hanya penikmat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Komunikasi Pembangunan

“*Development*” dan “*Communication*” merupakan dua istilah yang berbeda, yang keduanya disatukan dengan istilah – istilah di dalamnya, yaitu informasi, komunikasi, partisipasi, konsultasi, pembangunan kapasitas, pemberdayaan dan dialog (Mefalopulos, 2008). Komunikasi pembangunan berlandaskan pada asumsi bahwa keberhasilan pembangunan pedesaan memerlukan partisipasi yang sadar dan aktif dari para penerima manfaat yang dimaksudkan di setiap proses pembangunan (Balit & Acunzo, 2020).

Yudarwati & Gregory (2022) menjelaskan bahwa komunikasi dapat dipahami sebagai proses pemberdayaan di mana komunitas dapat berbagi apa yang mereka pikirkan, bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka dapat mencapainya. Sedangkan, pembangunan adalah proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi

yang luas dalam masyarakat, yang bertujuan untuk membawa kemajuan sosial dan material, termasuk kesetaraan dan kebebasan yang lebih besar terhadap lingkungan mereka (Rogers dalam Servaes, 2020).

Komunikasi pembangunan adalah studi tentang perubahan sosial yang dihasilkan dari penerapan penelitian, teori dan teknologi untuk mendorong pembangunan (Rogers dalam Servaes, 2020). Oleh karena itu, komunikasi pembangunan merupakan proses pemberdayaan yang memfasilitasi interaksi dan partisipasi aktif komunitas dalam berbagai pandangan, perasaan dan aspirasi, sehingga dapat mendukung pembangunan manusia, mendorong perubahan sosial yang positif dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada komunikasi pembangunan, muncul model komunikasi partisipatif yang menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam komunikasi sangat penting untuk keberhasilan proyek apa pun (Thomas, 2008). Model ini menekankan pentingnya identitas budaya komunitas lokal serta demokratisasi dan partisipasi di semua tingkat, baik internasional, nasional, lokal, dan individu. Model partisipatif ini mengikuti paradigma yang memandang pembangunan sebagai perubahan kondisi manusia. Model ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Waisbord, 2020).

Model partisipatif kurang berfokus pada perspektif politik-ekonomi dan lebih tertanam dalam aspek budaya pembangunan (Mefalopulos, 2008). Model komunikasi pembangunan partisipatif ini menitikberatkan pada pengetahuan lokal, partisipasi, dan pemberdayaan

(Waisbord, 2020). Selain itu, didasarkan pada upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan mereka sendiri (Thomas, 2008). Di sisi lain, Mckee et al., (2008) menjelaskan program pembangunan yang bertujuan untuk memfasilitasi kepemilikan komunitas dan komitmen terhadap perubahan harus mengutamakan pemberdayaan pada setiap tingkatan (individu, organisasi, dan komunitas). Hal ini dapat dipahami bahwa pembangunan di tingkat lokal tidak dapat terjadi tanpa perubahan sikap dan perilaku di antara orang – orang yang terlibat.

Partisipasi adalah konsep yang semakin mendapat pengakuan dan status dalam studi pembangunan. Pendekatan partisipatif mendorong pergeseran pandangan dari melihat individu sebagai penerima pasif menjadi agen aktif dalam upaya pembangunan (Mefalopulos, 2008; Waisbord, 2020). Sebagai agen, individu memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang sesuai. Pergeseran ini penting untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pihak lain, yang dilayani dalam proses pembangunan.

Pembangunan di wilayah pedesaan yang memiliki budaya spesifik memerlukan pendekatan perawatan dan dukungan yang sesuai. Hal ini menuntut adanya keterlibatan, komitmen, berbagi pengetahuan dan tindakan, membangun dialog, serta mendorong keterlibatan dan pemberdayaan (Lie, 2008). Kekuatan pembangunan terwujud dan terbukti dalam pemberdayaan semua orang di mana saja. Setiap individu maupun kelompok membutuhkan pemberdayaan untuk mencapai partisipasi yang

lebih besar dalam urusan masyarakat (Okigbo, 2021). Partisipasi aktif memperkuat *community engagement*, yang sama pentingnya bagi keberhasilan komunikasi dalam perubahan sosial (Okigbo, 2021).

Terdapat dua kata kunci dalam pembangunan yang berfokus pada manusia, baik individu maupun kelompok.

a. Partisipasi

Menurut Chin (2020) partisipasi didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan orang - orang dalam sebuah komunitas atau dalam proyek tertentu untuk memecahkan masalah mereka sendiri atau yang terjadi di lingkungan mereka dan hal tersebut memberikan pengaruh bagi kelangsungan hidup masyarakat. Dalam perspektif interpretatif, partisipasi, dialog dan pandangan aktif dari individu merupakan bagian penting untuk menilai lingkungan (Servaes, 2020). Nilai yang sangat dihargai dalam partisipasi menunjukkan rasa hormat dan apresiasi terhadap keunikan dan identitas lingkungan (Servaes, 2020).

Komunikasi pembangunan menjadi bagian penting yang mendorong *Internasional Development Research Centre* di Kanada (IDRC) memulai program penelitian di bidang ini pada tahun 1980- an. Tujuannya adalah untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan mereka (Uphoff dalam Srampickal, 2006).

Program penelitian ini mengidentifikasi empat cara partisipasi yang berbeda dan dapat diamati dalam sebagian besar proyek pembangunan yang mengklaim bersifat partisipatif, yaitu :

- i. Partisipasi dalam Pelaksanaan: Masyarakat didorong dan dimobilisasi secara aktif untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proyek. Mereka diberikan tanggung jawab dan menetapkan tugas, seperti menyediakan sumber daya yang diperlukan.
- ii. Partisipasi dalam Evaluasi: Masyarakat diundang untuk memberikan kritik dan saran mengenai keberhasilan atau kegagalan dari proyek yang telah dilaksanakan.
- iii. Partisipasi dalam Manfaat: Masyarakat turut dalam menikmati hasil dari proyek yang telah dilaksanakan, seperti air dari pompa tangan, perawatan medis, truk untuk mengangkut hasil panen ke pasar, atau pertemuan desa di balai komunitas.
- iv. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat terlibat dalam memulai, mendiskusikan, mengonseptualisasikan dan merancang kegiatan yang akan dilakukan bersama sebagai komunitas.

Pendekatan partisipatif dalam hal ini menekankan pentingnya komunikasi yang melibatkan refleksi kritis dan dialog untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku. Pendekatan ini juga bertujuan agar semua pihak yang terlibat dapat memberdayakan diri melalui tindakan nyata.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang mengarah pada individu yang mampu dan bersedia untuk mengambil bagian dalam keputusan yang berkaitan dengan keputusan kehidupan mereka sendiri (Mefalopulos, 2008). Martinez et al., (2017) juga menjelaskan bahwa pemberdayaan sering kali dikaitkan dengan tiga konsep lain, yakni:

i. Pemberdayaan dan Kekuasaan

Pemberdayaan sering kali dikaitkan dengan titik awal yang dicirikan sebagai kurangnya kekuasaan, yang dapat berupa kekurangan sumber daya pribadi dan komunitas, ketidakselarasan struktural dan masalah sosial lainnya.

ii. Pemberdayaan dan Partisipasi

Partisipasi individu, komunitas, dan politik, dianggap sebagai medium penting untuk mencapai pemberdayaan. Di sisi lain, beberapa penulis

menekankan pada agensi, yaitu kapasitas individu untuk bertindak terhadap lingkungan mereka, sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan tingkat pemberdayaan.

iii. Pemberdayaan dan Edukasi

Berkaitan dengan proses pemberdayaan dengan pendidikan dan pembelajaran, termasuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan, akuisisi kapabilitas, penguasaan berbagai sumber daya, dan peningkatan kesadaran.

Penekanan pada partisipasi dalam pembangunan menegaskan pentingnya komunikasi, karena partisipasi tidak mungkin terjadi tanpa komunikasi yang tepat. Komunikasi dengan masyarakat tidaklah mudah dan memerlukan *community engagement* yang mencakup partisipasi serta pemberdayaan di semua tingkat.

2.2.2 *Community Engagement*

Dunham et al., (dalam Johnston & Taylor, 2018) menawarkan empat kategori *community* yang dapat digunakan untuk memahami konsep “tujuan bersama”. Penelitian ini menyoroti kategori *community* berdasarkan lokasi, yaitu kelompok atau individu yang terhubung melalui tempat – tempat yang didefinisikan secara geografis, di mana mereka tinggal atau bekerja. Tujuan *community* berdasarkan lokasi adalah

pelestarian atau perbaikan tempat yang mereka tempati (Johnston & Taylor, 2018). Maka dari itu, komunitas merupakan komponen yang berfokus pada bagaimana individu atau kelompok terlibat dan membawa perubahan.

Engagement merupakan proses interaktif dan dinamis, di mana partisipasi, pengalaman, dan tindakan bersama menjadi komponen utama (Johnston & Taylor, 2018). Pada *collective level*, *engagement* dicatat sebagai konsep yang mendukung pemberdayaan anggota komunitas (Johnston, 2018). Heath (2018) menjelaskan bahwa adanya *engagement* memberikan manfaat sosial serta kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih baik dan mengingatkan organisasi bahwa mereka beroperasi sebagai instrumen atau cerminan dari suatu wilayah, membuat keterlibatan sangat penting bagi masyarakat yang ingin terlibat aktif.

Berdasarkan dua definisi yang berbeda dari *community* dan *engagement*, secara konseptual *community engagement* didefinisikan sebagai proses relasional yang memfasilitasi pemahaman dan evaluasi, keterlibatan, pertukaran informasi dan pendapat mengenai suatu konsep, isu, atau proyek, dengan tujuan membangun modal sosial dan meningkatkan hasil sosial melalui pengambilan keputusan (Johnston & Taylor, 2018). *Community engagement* juga dipahami sebagai partisipasi anggota masyarakat yang kooperatif dan saling mendukung dalam proses pembangunan (Lane & Hicks, 2014).

Community engagement dalam proses pembangunan memiliki tantangan saat implementasinya. Tantangan utama dalam *community*

engagement adalah kepercayaan (Yudarwati, 2019). Budaya kolektif cenderung membuat masyarakat menunjuk aktor – aktor kunci untuk merancang rencana dan mencapai tujuannya, di mana adanya sistem patriatikal sebagai ciri khas komunitas (Yudarwati, 2019). Yudarwati (2019) juga menjelaskan bahwa ketika masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional, tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk berpikir tentang masa depan, sehingga hal ini menghalangi untuk merencanakan langkah – langkah perubahan.

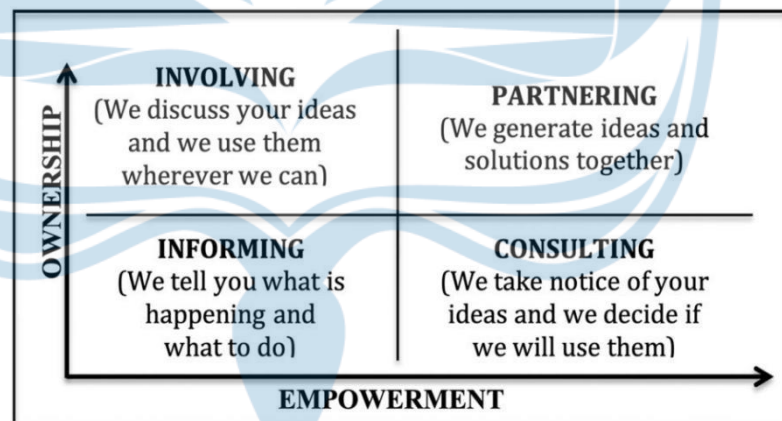
Penelitian ini menyoroti pendekatan keterlibatan yang berfokus pada komunitas sebagai aktor utama dari objek pembangunan, dan melihat mereka sebagai sistem manusia yang hidup yang terdiri dari pola-pola kepercayaan, pola-pola komunikasi, pola-pola tindakan dan reaksi, pola-pola pembentukan makna, dan pola-pola emosi (Lewis et al., 2008).

Terdapat tiga jenis *community engagement* yang dikemukakan oleh Johnston (2008) dan diadopsi dalam penelitian ini, yaitu :

- a. *Community Information*, keterlibatan yang sukses didasarkan pada informasi yang efektif, tepat, dan informasi yang tepat waktu yang diberikan kepada anggota masyarakat.
- b. *Community Consultation*, didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk meminta pendapat dan pandangan dari individu dan anggota masyarakat yang berkepentingan terkait dengan masalah yang ditetapkan oleh organisasi tertentu.

c. *Community Participation*, menunjukkan peran aktif anggota masyarakat dalam menciptakan makna dan mengembangkan solusi untuk masalah sosial yang kompleks atau solusi yang diusulkan yang berdampak pada komunitas tertentu (Janse & Konijnendijk dalam Johnston, 2010). Jenis keterlibatan masyarakat ini dianggap sebagai tingkat tertinggi, dan mencakup pemberdayaan anggota masyarakat serta kolaborasi sejati antara organisasi dan masyarakat.

Terdapat juga model kepemilikan dan pemberdayaan dari Yudarwati & Gregory (2022) yang diadopsi dalam penelitian ini untuk menjelaskan aspek - aspek *community engagement*.



Gambar 1. Model Kepemilikan dan Pemberdayaan Masyarakat (Yudarwati & Gregory, 2022)

- a. *Informing*, proses memberikan informasi yang seimbang dan objektif kepada publik guna membantu mereka memahami masalah, alternatif, peluang, dan/atau solusi.
- b. *Consulting*, proses mendapatkan umpan balik dari publik mengenai analisis, alternatif, dan/atau keputusan.

- c. *Involving*, proses bekerja langsung dengan publik sepanjang proses untuk memastikan bahwa kekhawatiran dan aspirasi publik dipahami dan dipertimbangkan secara konsisten.
- d. *Partnering*, proses bermitra dengan publik dalam setiap aspek keputusan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan.

Tiga jenis *community engagement* dan empat level ini merupakan bentuk operasional dalam mengategorikan hasil interaksi dan respons balik yang diberikan, sehingga dapat menggerakkan partisipasi masyarakat. Pertama, *informing*, untuk memahami bagaimana proses penyampaian informasi kepada masyarakat terkait program yang dijalankan. Kedua, *consulting*, memahami bagaimana cara mendengarkan dan mengakui aspirasi masyarakat serta memberikan umpan balik terhadap masukan yang diterima. Ketiga, *involving*, memahami bagaimana kekhawatiran dan aspirasi masyarakat dijadikan alternatif dari keputusan yang telah ada. Keempat, *partnering*, untuk memahami bagaimana masyarakat diminta untuk memberikan saran dan inovasi, termasuk rekomendasi dalam pengambilan keputusan.

2.2.3 Model Komunikasi Transaksional

Model komunikasi transaksional menekankan bahwa komunikasi adalah proses yang saling memengaruhi, di mana pengirim dan penerima pesan berinteraksi secara simultan (West & Turner, 2021). Model transaksional melihat komunikasi sebagai sebuah proses kooperatif di mana kedua pihak membangun makna bersama (West & Turner, 2021). Model transaksional juga menekankan pentingnya pengalaman masa lalu dari tiap individu dalam memengaruhi cara mereka berkomunikasi (West & Turner, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan selama interaksi dipengaruhi oleh latar belakang dan pengalaman hidup.

Pada konteks pembangunan dan pemberdayaan ini, model komunikasi transaksional dilihat berdasarkan *communal relationship*. Relasi ini menyoroti relasi komunitas dan masyarakat dalam pembangunan untuk menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama (Hirsch et al., 2022). Hal ini menekankan bahwa manfaat yang diberikan dianggap sebagai respons terhadap kebutuhan atau keinginan untuk saling membantu dan mendukung satu sama lain (Clark & Aragón, 2013). *Communal relationship* terjadi ketika manfaat transaksi diberikan karena kebutuhan akan manfaat tersebut, bukan sebagai imbalan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengkaji komunikasi pembangunan melalui proses *community engagement* untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. Fokus utama adalah pada pembangunan manusia yang juga menekankan relasi komunitas adat dan masyarakat,

serta model partisipatif, dengan menyoroti pentingnya *community engagement* dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam menjalankan *community engagement*. Dalam konteks ini, *community* dipahami sebagai sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah dan memiliki kesamaan suku, minat, serta pemahaman terhadap nilai – nilai lokal dan adat istiadat yang diwariskan secara turun – temurun. Sementara itu, *engagement* dimaknai sebagai upaya komunikasi interaktif yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama demi keberlangsungan kehidupan komunitas. Dengan demikian, proses *community engagement* dalam penelitian ini adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh komunitas melalui komunikasi yang interaktif, guna mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam program pembangunan pariwisata, dengan mempertimbangkan tindakan, pengalaman, partisipasi, niat dan orientasi kelompok terhadap kesejahteraan bersama.

Pada dalam penelitian ini, komunitas dipandang sebagai objek yang mempengaruhi komunitas melalui proses komunikasi. Komunikasi dilihat sebagai proses yang lebih aktif dan dinamis, di mana pengirim dan penerima terus – menerus memengaruhi dan membentuk makna satu sama lain. Dalam *community engagement*, penting untuk menciptakan makna yang sama atau kesepahaman bersama antara semua pihak terlibat, termasuk anggota komunitas, pemimpin dan pengambil keputusan. Adanya *engagement* yang bersifat transformasional dan kontekstual memungkinkan pengelolaan program bersama, pengambilan keputusan dan kepemilikan bersama yang menggerakkan partisipasi masyarakat.

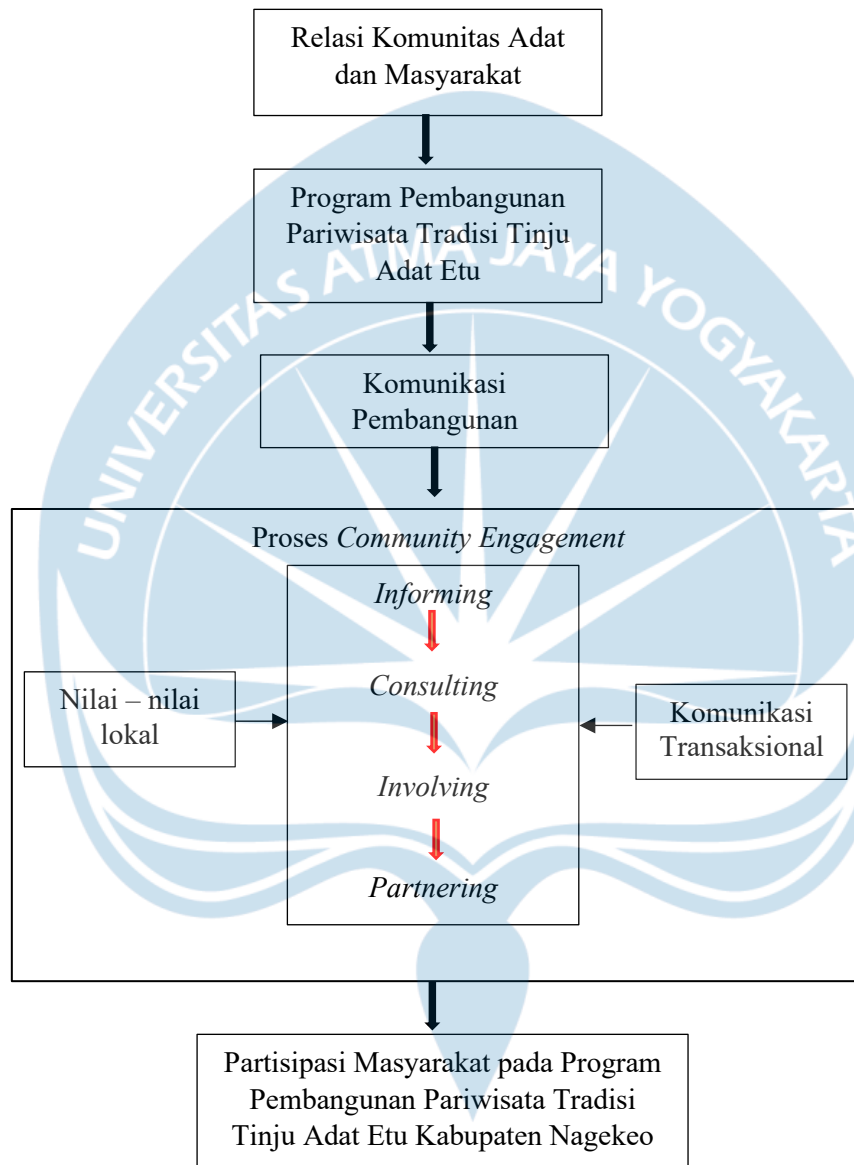
Proses *community engagement* dalam penelitian ini melihat empat aspek utama dari *community engagement* berdasarkan model kepemilikan dan

pemberdayaan, yaitu, 1) *informing*, tahap penyampaian informasi yang seimbang dan objektif kepada masyarakat, sehingga mengedukasi masyarakat tentang program pembangunan pariwisata dan peluang yang ada. 2) *Consulting*, tahap mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan lokal dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan. 3) *Involving*, tahap di mana komunitas melibatkan masyarakat secara langsung; dan 4) *partnering*, tahap kemitraan dan kolaborasi dengan masyarakat, yang sejalan dengan fokus penelitian yaitu untuk menggerakkan masyarakat pada pembangunan pariwisata tradisi tinju adat etu di Kabupaten Nagekeo.

Proses *community engagement* dijelaskan menggunakan studi kasus pembangunan pariwisata tradisi tinju adat etu di Kabupaten Nagekeo. Tradisi ini sebagai usaha pembangunan pariwisata di Kabupaten Nagekeo untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dari hal ini, muncul permasalahan berupa partisipasi masyarakat dan kekuatan kekuasaan dari pemangku adat. Partisipasi masyarakat sebagai konsep kunci dari *community engagement* menunjukkan bahwa keterlibatan dari pihak – pihak terkait pembangunan menjadi suatu hal penting dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi yang dapat terjadi pada berbagai tingkat dan derajat (misalnya, dari partisipasi pasif hingga menjadi bentuk kolaborasi yang penuh).

Penelitian merupakan penelitian kualitatif. *Focus group discussion* sebagai sumber data utama, kemudian melakukan *probing* dalam bentuk wawancara mendalam dengan jenis wawancara semi-struktur kepada informan yang mengetahui tradisi tinju adat etu dan masyarakat adat. Wawancara semi-terstruktur sering digunakan, karena memberikan ruang yang cukup bagi informan untuk menjawab dengan bebas dan memberikan wawasan yang berguna, sambil mempertahankan

ketelitian dan konsistensi terhadap isu-isu yang dibahas. *Community engagement* digunakan dalam penelitian ini karena adanya kolaborasi dan partisipasi yang terkandung di dalamnya.



Gambar 2. Kerangka Penelitian